PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP EFEKTIVITAS DALAM MENEKAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN GUNUNGGIDUL

THE INFLUENCE OF SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND PROTECTION POLICY IMPLEMENTATION TO EFFECTIVENESS OF PRESSING LAND CONVERSION IN GUNUNGGIDUL REGENCY

Angki Intan Utami*¹, Pamuji Raharjo²

¹ Fakultas Pertanian, Universitas Gunung Kidul

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gunung Kidul

Dikirim : 10 Januari 2025   Diperiksa : 21 April 2025   Diterima: 26 Mei 2025

ABSTRAK

Keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) perlu disikapi dengan bijak guna menekan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh implementasi kebijakan perlindungan LP2B terhadap efektivitasnya dalam menekan laju alih fungsi lahan pertanian. Implementasi kebijakan yang baik dan tepat akan berhasil dan memberikan dampak dalam menekan alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah efektivitas kebijakan dan implementasi kebijakan. Responden yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 54 responden. Data dianalisis dengan uji *Chi-Square* untuk melihat pengaruh implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Gunungkidul terhadap efektivitas kebijakan dalam menekan laju alih fungsi lahan pertanian. Hasil analisis menunjukkan nilai *Asymp.Sig* 0,051. Nilai ini lebih besar dari nilai kritis 0,05. Berdasarkan hipotesis penelitian, maka *H₀* diterima dan *H_a* ditolak. Hal ini artinya kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Gunungkidul tidak efektif dalam menekan laju alih fungsi lahan pertanian. Sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi antara pemangku kebijakan serta partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Alih Fungsi Lahan, Efektivitas, Implementasi, Kebijakan Perlindungan LP2B

ABSTRACT

*The existence of Sustainable Food Agricultural Land (SFAL) needs to be addressed wisely in order to reduce the rate of conversion of agricultural land to non-agricultural land. This research aims to see the effect of implementing the SFAL protection policy on its effectiveness in reducing the rate of conversion of agricultural land. Implementation of good and appropriate policies will be successful and have an impact in reducing the conversion of agricultural land. This research was carried out using a quantitative descriptive approach. The variables used are policy effectiveness and policy implementation. The respondents used in this research were 54 respondents. Data were analyzed using the Chi-Square test to see the effect of implementing the SFAL protection policy in Gunungkidul Regency on the effectiveness of the policy in reducing the rate of conversion of agricultural land. The analysis results show an *Asymp.Sig* value of 0.051. This value is greater than the critical value of 0.05. Based on the research hypothesis, *H₀* is accepted and *H_a* is rejected. This means that the SFAL protection policy in Gunungkidul Regency is not effective in reducing the rate of conversion of agricultural land. So coordination and consolidation between policy makers and community participation is needed.*

Keywords: Land Conversion, Effectiveness, Implementation, SFAL Protection Policy

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP EFEKTIVITAS DALAM MENEKAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Angki Intan Utami^{*1}, Pamuji Raharjo²

PENDAHULUAN

Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang vital. Tanpa asupan makanan yang cukup dan bergizi, kesehatan akan terancam, produktivitas menurun, dan kualitas hidup memburuk. Ketersediaan pangan yang memadai adalah kunci bagi kesejahteraan individu dan masyarakat.

Ketersediaan pangan yang cukup juga menyangkut stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kekurangan pangan dapat memicu konflik, kemiskinan, dan menghambat pembangunan. Kebutuhan pangan manusia tidak pernah surut seiring dengan pertumbuhan populasi dunia yang semakin pesat.

Kebutuhan pangan sangat berkaitan erat dengan ketersediaan lahan (Dayanti dan Soetjipto, 2024). Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis sebagai sumber daya pokok dalam usaha pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat (Janti et al., 2016).

Berdasarkan data dan proyeksi pertumbuhan penduduk tahun 2015-2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 318,96 juta jiwa pada tahun 2045 (Djarot dan Putri, 2020). Seiring dengan bertambahnya jumlah

penduduk yang berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan, maka alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak dapat dihindari (Wulandari dan Rahman, 2017).

Alih fungsi lahan pertanian adalah perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non-pertanian. Proses ini dapat terjadi secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Faktor-faktor yang mendorong alih fungsi lahan antara lain pertumbuhan penduduk yang pesat meningkatkan kebutuhan lahan untuk perumahan, industri, dan infrastruktur. Selain itu perpindahan penduduk dari desa ke kota juga mendorong perluasan kawasan perkotaan sehingga akan menggeser dan mengurangi lahan pertanian. Meningkatnya nilai ekonomis lahan juga mendorong alih fungsi lahan karena membuat lahan pertanian menjadi lebih menarik untuk dijadikan kawasan non-pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian berpengaruh terhadap penurunan produksi pertanian dan dalam jangka panjang dapat mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan.

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya menekan alih fungsi lahan pertanian. Tekanan ekonomi yang tinggi seringkali mendorong petani untuk menjual lahannya. Hal ini diperkuat dengan kurangnya kesadaran

masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan pertanian.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, antara lain melalui kampanye dan pendidikan, masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang pentingnya menjaga lahan pertanian. Selain itu, penguatan kelembagaan petani juga penting karena petani akan memiliki bargaining power yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan.

Diperlukan sinergi antar stakeholder, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bekerja sama melindungi lahan pertanian. Peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, perlu dirancang kebijakan yang mengatur penataan ruang dan wilayah, sehingga setiap kebijakan dapat diterapkan sesuai dengan wilayah dan peruntukannya.

Kebijakan penataan ruang dan wilayah adalah sebuah strategi yang dirancang untuk mengatur dan mengembangkan suatu daerah dengan cara yang efektif dan berkelanjutan (Firdiansyah et al., 2017).

Kebijakan penataan ruang dan wilayah penting untuk mencegah konflik penggunaan lahan. Dengan adanya

rencana tata ruang yang jelas, konflik antara berbagai kepentingan, misalnya kepentingan industri dan lingkungan, dapat diminimalisir. Selain itu kebijakan penataan ruang dan wilayah penting untuk meningkatkan efisiensi pembangunan. Dengan perencanaan yang baik, pembangunan dapat dilakukan secara terarah dan menghindari pemborosan. Penataan ruang dan wilayah juga penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, karena kebijakan yang baik akan membantu menjaga kualitas lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan alih fungsi lahan pertanian, salah satunya adalah UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan LP2B merupakan upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu disikapi dengan bijak guna menghindari atau paling tidak meminimalisir alih fungsi

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP EFEKTIVITAS DALAM MENEKAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Angki Intan Utami^{*1}, Pamuji Raharjo²

lahan pertanian ke non pertanian (Wulandari dan Rahman, 2017).

Kebijakan LP2B di Kabupaten Gunungkidul dituangkan dalam Perda No 23 Tahun 2012. Perda ini dilatarbelakangi dengan semakin berkurangnya lahan pertanian pangan di Kabupaten Gunungkidul karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, maka pemerintah daerah mengkhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi masyarakat.

Menurut kabarhandayani.com (2019), Pemkab Gunungkidul melakukan pencegahan alih fungsi lahan dari pertanian ke lahan non pertanian melalui Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) dengan cara seluas 51.312 hektar hendak dipertahankan keberadaannya sebagai lahan pertanian melalui program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). PLP2B tersebar di 18 kecamatan. PLP2B terluas ada di Kecamatan Ponjong mencapai 6.018 hektar, sedangkan paling sempit ada di Nglipar seluas 1.058 hektar.

Penyebab penyusutan lahan pertanian salah satunya adalah maraknya pembangunan setiap tahunnya. Selain pendirian bangunan, peralihan fungsi lahan disebabkan karena lahan dijual untuk kebutuhan. Pemkab tidak akan menerbitkan izin jika pembangunan berada di kawasan PLP2B. Sebagai

upaya untuk mengurangi penyusutan lahan pertanian, Pemkab Gunungkidul melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) No.6/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu menerbitkan perda tersebut karena sebagai tindak lanjut dari kebijakan di provinsi maupun pusat, yaitu: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fenomena alih fungsi lahan menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari bagi suatu daerah tanpa terkecuali, salah satunya adalah Kabupaten Gunungkidul. Data BPS Kabupaten Gunungkidul menunjukkan luas panen padi sawah tahun 2023 seluas 14.899,31 hektar, turun 81,77 hektar dari luasan tahun 2022 seluas 14.981,08 hektar. Sedangkan luas panen padi ladang, tahun 2022 seluas 41.714,00

hektar menjadi 41.367,00 hektar di tahun 2023, turun sebesar 347 hektar (BPS Kabupaten Gunungkidul, 2024).

Perda Kabupaten Gunungkidul No. 23 Tahun 2012 tentang PLP2B bertujuan untuk menekan laju alih fungsi lahan dan mengurangi konversi lahan (Kamayani, 2016). Dengan penetapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), maka diharapkan masyarakat tidak menjual lahannya atau mengkonversikan peruntukannya untuk sektor non pertanian.

Laju alih fungsi lahan dapat dikendalikan apabila pemerintah secara bertahap mampu membeli lahan pertanian produktif, kesejahteraan petani diperbaiki sehingga ada daya tarik untuk berusaha tani (Artantyo, 2018).

Pada kenyataannya, Perda Perlindungan LP2B yang bertujuan untuk menekan alih fungsi lahan masih menjadi masalah, karena setelah adanya perda tersebut, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tetap terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Salah satu faktor penyebabnya adalah masifnya pembangunan atau pengembangan kawasan industri dan pariwisata di wilayah Gunungkidul. lahan kehutanan tidak lagi menjadi kawasan LP2B, adanya program strategis pemerintah seperti jalur jalan lintas selatan (JJLS), kawasan industri di Kapanewon Semin, buffer jalan, terminal, dan hotel (Kusumo, 2021).

Selain itu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul mengusulkan untuk mengurangi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), karena dianggap kawasan LP2B menghambat laju pembangunan (Fadli, 2022).

Alih fungsi lahan yang tetap terjadi bukan berarti kebijakan tersebut gagal dalam menekan laju alih fungsi lahan. Berhasilnya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tentunya akan dipengaruhi oleh kerjasama berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan tersebut dinilai berhasil atau memberikan dampak yang positif jika terjadi pencapaian sasaran yang telah disepakati sebagai usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas (Seputra, 2020).

Menurut Edward implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling terkait dan mempengaruhi implementasi. Diantara faktor yang mempengaruhi sebuah proses implementasi antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Seputra, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh implementasi kebijakan perlindungan LP2B terhadap efektivitasnya dalam menekan laju alih fungsi lahan pertanian. Implementasi kebijakan yang baik dan tepat akan

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP EFEKTIVITAS DALAM MENEKAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Angki Intan Utami^{*1}, Pamuji Raharjo²

berhasil dan memberikan dampak dalam menekan alih fungsi lahan pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Desember 2024. Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan metode deskriptif. Variabel yang digunakan adalah efektivitas kebijakan dalam menekan alih fungsi lahan dan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sebagai variabel terikat adalah efektivitas kebijakan (Y) dengan indikator keberhasilan dan dampak. Sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah implementasi kebijakan (X) dengan indikator: komunikasi; disposisi; sumberdaya; dan struktur birokrasi.

Populasi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pelaksana kebijakan dan masyarakat dalam hal ini petani pemilik lahan pertanian pangan. Teknik penarikan sampel yang digunakan untuk populasi pelaksana kebijakan adalah *judgmental sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan penilaian subjektif karena pengetahuannya mengenai kebijakan Perlindungan LP2B di Kabupaten Gunungkidul. Pada kelompok ini ditentukan sejumlah 12 responden yang berasal dari Bappeda Kabupaten

Gunungkidul, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul.

Untuk kelompok masyarakat atau petani pemilik lahan pertanian pangan, jumlah responden ditentukan dengan *stratified random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang membagi populasi menjadi kelompok kecil atau strata berdasarkan karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini, pembagian kelompok berdasarkan luasan kawasan LP2B di setiap kapanewon yang telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Gunungkidul No. 23 Tahun 2012. Dari 18 kapanewon ditentukan masing-masing jumlah responden dan didapatkan total responden dari populasi masyarakat sejumlah 42 responden. Dengan demikian total keseluruhan responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 54 responden.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan kuisisioner. Selain itu digunakan data sekunder yang berasal dari Peraturan Daerah terkait kebijakan perlindungan LP2B serta sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal.

Data dianalisis dengan uji *Chi-Square* untuk melihat pengaruh implementasi kebijakan perlindungan

LP2B di Kabupaten Gunungkidul terhadap efektivitas kebijakan dalam menekan laju alih fungsi lahan pertanian.

Hipotesis penelitian adalah:

Ho : kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Gunungkidul tidak efektif dalam menekan laju alih fungsi lahan pertanian

Ha : kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Gunungkidul efektif dalam menekan laju alih fungsi lahan pertanian

Dasar pengambilan pada uji *Chi Square* adalah membandingkan nilai Asymp.Sig dengan batas kritis 0,05. Jika nilai Asymp.Sig (2-sided) > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jika nilai Asymp.Sig (2-sided) < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas suatu kebijakan dilihat dari keberhasilan dan dampak yang ditimbulkan. Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dampak yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif, akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas kebijakan tersebut. Kebijakan perlindungan LP2B bertujuan untuk

menekan laju alih fungsi lahan. Untuk melihat apakah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan dampak, perlu diuji tingkat keefektifitasannya.

Kebijakan perlindungan LP2B efektif jika kebijakan ini berhasil dan memberikan dampak terhadap laju alih fungsi lahan. Untuk melihat efektivitasnya, dilihat dari komunikasi yang dilakukan dari pemangku kebijakan kepada masyarakat atau kelompok sasaran, pengelolaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, disposisi pemangku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dan struktur birokrasi terkait koordinasi dalam melaksanakan kebijakan.

Untuk melihat pengaruh keefektifan kebijakan perlindungan LP2B dalam menekan alih fungsi lahan pertanian, dilakukan analisis *Chi-Square*. Hasil analisis *Chi Square* ditunjukkan pada Tabel 1. Hasilnya menunjukkan nilai Asymp.Sig 0,051. Nilai ini lebih besar dari nilai kritis 0,05. Berdasarkan hipotesis penelitian, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini artinya kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Gunungkidul tidak efektif dalam menekan laju alih fungsi lahan pertanian.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP EFEKTIVITAS DALAM MENEKAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Angki Intan Utami*¹, Pamuji Raharjo²

Tabel 1. Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.954 ^a	2	.051
Likelihood Ratio	5.947	2	.051
Linear-by-Linear Association	3.081	1	.079
N of Valid Cases	54		

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.26

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup proses pertukaran informasi antara berbagai pihak yang terlibat. Komunikasi dua arah, baik dari bawah ke atas (pelaksana ke pengambil kebijakan) maupun dari atas ke bawah (pengambil kebijakan ke pelaksana dan masyarakat), sangat penting untuk memastikan semua pihak memahami dan menjalankan kebijakan dengan baik. Komunikasi bottom-up memungkinkan pelaksana kebijakan menyampaikan kendala, kemajuan, dan usulan perbaikan kepada pengambil kebijakan. Sebaliknya, komunikasi top-down memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat, memahami tujuan dan tata cara pelaksanaan kebijakan.

Dalam penelitian ini, komunikasi yang terjadi tidak menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan LP2B efektif dalam menekan laju alih fungsi lahan. Menurut bappeda.gunungkidul.kab.go.id (2021), pada tanggal 24 November sampai dengan 3 Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mensosialisasikan LP2B di seluruh Kapanewon dengan narasumber Bupati,

Wakil Bupati, dan beberapa perwakilan Perangkat Daerah.

Sosialisasi yang dilakukan tidak cukup kuat untuk menahan laju alih fungsi lahan. Perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus yang terpenting adalah melibatkan masyarakat, dalam hal ini petani, baik perorangan maupun melalui Lembaga seperti kelompok tani. Putranto (2019) menyatakan implementasi PLP2B juga sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi petani untuk keefektifan kebijakan.

Dalam hal sosialisasi kebijakan, dinas yang memiliki tugas untuk melaksanakan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul. Namun kolaborasi dan koordinasi dalam sosialisasi perlu dilakukan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan terjun langsung ke tingkat kecamatan, desa, kelompok informasi masyarakat, maupun tokoh kunci.

Melalui komunikasi yang baik, terjalin sinergi yang kuat antara pihak internal (pelaksana kebijakan) dan pihak eksternal (masyarakat, pihak terkait

lainnya) sehingga kebijakan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya.

Sumber daya menjadi faktor penentu keberhasilan dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B. Dalam penelitian ini, sumber daya yang dimiliki tidak menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan LP2B efektif dalam menekan laju alih fungsi lahan.

Sumber daya keuangan yang memadai diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program sangat diperlukan, karena kebijakan ini akan terus disosialisasikan dan dievaluasi setiap tahun untuk melihat bagaimana keefektifannya dalam menekan alih fungsi lahan pertanian.

Distribusi anggaran yang efektif dan efisien ke berbagai kegiatan yang menjadi prioritas. Dibutuhkan kolaborasi untuk sumber pendanaan, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta.

Selain itu, sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan dalam implementasi kebijakan ini. Pemangku kebijakan dalam bidang pertanian, perencanaan, dan kebijakan publik sangat dibutuhkan.

Jumlah petugas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan di lapangan, seperti pengawasan, penyuluhan, dan penegakan hukum juga

diperlukan. Selain itu, tingkat komitmen dan dedikasi petugas dalam menjalankan tugasnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan program.

Selain sumber daya keuangan dan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya teknologi juga penting untuk ditingkatkan. Penggunaan teknologi informasi untuk mengelola data, melakukan analisis, dan menyebarkan informasi perlu ditingkatkan. Penggunaan peralatan modern diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kerja, seperti drone untuk pemetaan lahan, sensor untuk monitoring kondisi tanah, dan sistem irigasi otomatis.

Dengan penggunaan teknologi diharapkan kebijakan dapat diterapkan dengan lebih efektif sehingga mampu menekan laju alih fungsi lahan. Faktor disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi kebijakan ini karena profesionalitas, komitmen dan tanggung jawab pemangku kebijakan akan sangat dibutuhkan mengingat alih fungsi lahan akan mengancam ketersediaan lahan pertanian dan lebih jauh akan mengancam ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, disposisi yang terjadi tidak menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan LP2B efektif dalam menekan laju alih fungsi lahan. Disposisi kebijakan merupakan langkah

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP EFEKTIVITAS DALAM MENEKAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Angki Intan Utami¹, Pamuji Raharjo²

penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan perlindungan LP2B berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Disposisi yang tepat akan memberikan arah yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Faktor terakhir yang mempengaruhi efektivitas kebijakan perlindungan LP2B adalah faktor struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, faktor struktur birokrasi yang terjadi tidak menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan LP2B efektif dalam menekan laju alih fungsi lahan.

Struktur birokrasi yang jelas akan memberikan perintah dan koordinasi yang jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam implementasi kebijakan karena mengikuti satu petunjuk. Struktur birokrasi yang jelas juga akan memberikan kejelasan tanggung jawab pada tiap-tiap unit pelaksana di bawahnya sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih tugas maka peran organisasi akan efektif dan efisien.

Kebijakan perlindungan LP2B ini terdiri dari berbagai instansi atau SKPD yang menangani dan struktur birokrasinya mengikuti struktur organisasi/ instansi tersebut. Menurut Wibowo et al. (2015), hal ini berpotensi menjadi konflik kepentingan karena masing-masing instansi sudah memiliki prosedur operasi yang standar (standard

operating procedures atau SOP) dan menjadi pedoman para implementor menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan aturan yang ada.

Kebijakan yang melibatkan banyak pemangku kebijakan diperlukan koordinasi yang terus menerus untuk menghindari kesalahpahaman dalam implementasi di masyarakat. Kebijakan perlindungan LP2B tidak hanya sektor pertanian, namun sektor perencanaan dan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan kawasan pemukiman, serta sektor tata ruang. Selain itu sektor kehutanan juga termasuk di dalamnya karena sebelumnya kawasan hutan di Kabupaten Gunungkidul juga masuk menjadi kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Banyaknya sektor yang terlibat ini mempengaruhi kepentingan masing-masing sektor, sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan di masyarakat.

Dalam penelitian ini ditemukan faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan perlindungan LP2B untuk menekan laju alih fungsi lahan. Kurang meratanya dalam hal sosialisasi kepada instansi atau SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan sosialisasi kurang intensitas dan efektif. Diperlukan keterlibatan dan partisipasi masyarakat supaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait kebijakan tersebut, sehingga

dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal.

Selain itu budaya yang ada di masyarakat seperti sistem bagi waris di masyarakat terhadap lahan waris tersebut yang cenderung dimanfaatkan menjadi lahan non-pertanian atau bahkan diperjual-belikan karena keterbatasan fasilitas, sarana, dan prasarana untuk mengolah lahan pertaniannya. Selain itu nilai tukar pertanian yang rendah sehingga mayoritas lahan dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian.

Pengembangan sektor wisata di Kabupaten Gunungkidul juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan perlindungan LP2B ini. Mayoritas investor lahan akan menggunakan lahannya yang telah dialihfungsikan sebagai tempat wisata atau yang mendukung wisata, bukan untuk pertanian.

Dengan tidak efektifnya implementasi kebijakan LP2B dalam menekan laju alih fungsi lahan, diperlukan koordinasi dan konsolidasi antara pemangku kebijakan. Selain itu partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menekan laju alih fungsi lahan.

KESIMPULAN

Kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Gunungkidul tidak efektif

dalam menekan laju alih fungsi lahan pertanian. Sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi antara pemangku kebijakan serta partisipasi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul.

DAFTAR PUSTAKA

- Artantyo, I.O. 2018. *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan* <<https://repository.ums.ac.id/handle/123456789/30565>> Diakses tanggal 27 November 2024
- bappeda.gunungkidulkab.go.id. 2021. Bappeda Turut Mensosialisasikan LP2B. <<http://bappeda.gunungkidul.kab.go.id/tag/sosialisasi-lp2b/>> Diakses 27 November 2024
- BPS Kabupaten Gunungkidul. 2024. *Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang (Hektar), 2021-2023*. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIjMg==/luas-panen-padi-sawah-dan-padi-ladang.html>. Diakses tanggal 22 Desember 2024
- Dayanti, W.R., dan Soetjipto, W. 2024. *Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan*

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP EFEKTIVITAS DALAM MENEKAN ALIH
FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Angki Intan Utami^{*1}, Pamuji Raharjo²

-
- Berkelanjutan (LP2B) Terhadap Sektor Pertanian. *Journal Syntax Idea*. 6(04):1771-1784
- Djarot, I.N. dan Putri, M.N. 2020. *Foresight: Teknologi Kebencanaan Indonesia 2045*. Kanisius. Yogyakarta
- Fadli, R. 2022. *Dianggap Menghambat Laju Pembangunan, LP2B Gunungkidul Diusulkan Dipangkas 25 Ribu Hektar*. <https://pidjar.com/dianggap-menghambat-laju-pembangunan-lp2b-gunungkidul-diusulkan-dipangkas-25-ribu-hektar/42279/>
- Firdiansyah, F., Santosa, E., dan Astuti, P. 2017. Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Dan Persepsi Masyarakat Tentang Asli Fungsi Lahan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani. *Journal of Politic and Government Studies*. 6(03):571-580.
- Janti, G.I., Martono, E., dan Subejo. 2016. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*. 22(1):1-21
- kabarhandayani.com. 2019. *Puluhan Ribu Hektar Lahan Pertanian Dilindungi Dari Alih Fungsi, Tersempit Di Nglipar* <<https://kabarhandayani.com/puluh-an-ribu-hektar-lahan-pertanian-dilindungi-dari-alih-fungsi-tersempit-di-nglipar/?amp>> Diakses tanggal 27 November 2024
- Kamayani, A.N.L. 2016. *Perwujudan Ketahanan Pangan Lokal (Studi Pada Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/PLP2B di Kabupaten Gunungkidul)*. <<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/98519>> Diakses tanggal 27 November 2024
- Kusumo, H.J. 2021. *Lahan Pertanian Di Gunungkidul Semakin Susut, Ini Penyebabnya*. <<https://regional.espos.id/lahan-pertanian-di-gunungkidul-semakin-susut-ini-penyebabnya-1211572>> Diakses tanggal 27 November 2024
- Putranto, A.E. 2019. Sikap Petani Terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Di Kabupaten Bantul. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30372>
- Seputra, I.I. 2020. Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 7(2):408-420
- Wibowo, S.P., Widayati, W., dan Astrika, L. 2015. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Temanggung*. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/8857>
- Wulandari, D.A., dan Rahman, A.Z. 2017. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032). *Journal of Public Policy and Management Review*. 6(2):1-12